

## Hasil Analisis Data SiRUP POLRI per 20 Maret 2022

### A. Gambaran Umum

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui government spending atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain. Pembangunan sektor riil di Indonesia diharapkan dapat diwujudkan melalui salah satu instrumennya yaitu Belanja Barang dan Belanja Modal. Penyerapan anggaran kedua jenis belanja ini dilakukan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kebijakan penyerapan anggaran dan pelaksanaan PBJ sudah menjadi agenda setting dari pemerintah. Presiden telah mengambil kebijakan agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal yaitu sebelum dokumen anggaran diterbitkan (tender Pra DIPA/Perda APBD). Untuk mendukung kebijakan Presiden tersebut, APIP K/L/D dapat berperan lebih proaktif menjalankan fungsi *early warning system* dan *quality assurance* dengan cara melakukan reviu atas pelaksanaan tender Pra DIPA/Perda APBD di masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

### B. Data Umum Obyek Pengawasan

#### 1. Gambaran Umum Obyek Pengawasan

Kegiatan pendampingan reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA PBJ) telah dilaksanakan oleh BPKP sejak beberapa tahun lalu. Salah satu Kementerian/Lembaga yang menjadi obyek pendampingan reviu pada Direktorat Pengawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tujuan dari reviu PAPBJ adalah untuk mendapatkan informasi tentang pola penyerapan anggaran yang cenderung tidak optimal dimana penyerapan anggaran rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun. Rendahnya penyerapan anggaran khususnya belanja modal pada awal tahun anggaran yang menjadi perhatian serius pemerintah karena telah berdampak kepada perlambatan perekonomian nasional.

## 2. Metodologi

Dari pelaksanaan pendampingan reviu PA PBJ oleh Tim Reviu Itwasum Polri yang akan dibahas adalah Analisis Data Hasil Download per 20 Maret 2022 dari SiRUP Polri (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diperoleh dari Kedeputian Perekonomian (selaku Rendal) dan dibandingkan dengan data SiRUP Polri yang diproses oleh Tim Reviu Itwasum Polri.

Kendala yang dialami pada saat memproses data Data Hasil Download per 20 Maret 2022 dari SiRUP Polri dari LKPP adalah tidak seluruh informasi yang diperlukan tersedia, sedangkan jumlah satker di Polri s.d.akhir tahun 2021 sebanyak 1.418 satker, sehingga terdapat kesulitan untuk memproses data dengan menggunakan aplikasi *excell*, sehingga lebih banyak digunakan evaluasi secara visual di *excel* dikombinasi dengan *vlookup* dan *pivot table*.

## C. Analisis Data dan Hasil

### 1. Data Inputan yang Disampaikan oleh Tim Reviu Itwasum Polri

Tim Itwasum Polri dalam melakukan reviu tidak sepenuhnya didampingi oleh Tim Pendamping dari BPKP. Hasil reviu Tim Itwasum Polri diinput ke dalam aplikasi PA PBJ milik BPKP mengenai anggaran dan realisasinya (Pengelolaan Anggaran – PA) dan jumlah kontrak, nilainya dan progres dari Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

Ringkasan mengenai Rencana dan Realisasi SiRUP Pengadaan Barang/Jasa menurut Tim Reviu Itwasum BPKP yang berasal dari olahan SiRUP yang terdiri dari 5.308 baris dan 30 kolom, disajikan sebagai berikut

No	Uraian	Rencana Tender Harus Input di SIRUP		Pengadaan Tender Sudah Input di SIRUP		% Realisasi terhadap Rencana s.d Triwulan Ini	
		Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)	Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)	Jumlah PBJ (Paket)	Nilai PBJ (Rp)
1.	Bel. Barang	4.994	6.339.245.464.308	2.138	3.436.524.110.959	42,81	54,21
2.	Bel. Modal	314	17.816.496.743.424	244	4.688.768.497.450	77,71	26,32
	Jumlah	5.308	24.155.742.207.732	2.382	8.125.292.608.409	44,88	33,64

## 2. Hasil Analisis

Hasil analisis atas data SiRUP yang disampaikan oleh Tim Itwasum Polri dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan data, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Row Labels	Sum of Pagu 2022	Sum of real
Bel Pegawai	19.183.110.000	19.124.490.000
Bel Barang	6.320.062.354.308	3.417.399.620.959
Bel Modal	17.816.496.743.424	4.688.768.497.450
<b>Grand Total</b>	<b>24.155.742.207.732</b>	<b>8.125.292.608.409</b>

Berdasarkan tabel di nomor 2 di atas, diketahui bahwa terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp19.183.110.000,00 yang terdapat dalam tabel di nomor 1 sebagai bagian dari Belanja Barang dan Belanja Modal menurut Tim Itwasum Polri.

Data realisasi (*sum of real* pada tabel di atas) tidak dapat dianalisis karena berdasarkan hasil wawancara dengan operator di Tim Itwasum Polri, diketahui hal ini diperoleh berdasarkan pertimbangan atas tanggal yang tersedia di dalam data SiRUP.

Hasil analisis atas data SiRUP yang diperoleh dari LKPP melalui rendal (Kedeputusan Perekonomian) yang terdiri dari 18.486 baris dan 33 kolom, diperoleh data sebagai berikut:

Row Labels	Sum of Pagu 2022
Bel Pegawai	27.993.371.000
Bel Barang	12.943.210.709.828
Bel Modal	20.963.869.024.626
<b>Grand Total</b>	<b>33.935.073.105.454</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp27.993.371.000,00, hal ini terjadi karena operator SiRUP di satker lingkungan Polri (jumlah seluruh satker 1.418 satker, termasuk Satker di Mabes Polri, Polda, Polres, dan RS Bhayangkara) kurang memahami data-data yang harus diinput ke dalam Aplikasi SiRUP, hal ini ditunjukkan masih ada yang memasukan Biaya Gaji ke dalam Aplikasi SiRUP.

Dari Analisis atas Belanja Barang ditemukan data-data pada table di ki bawah ini:

<b>Row Labels</b>	<b>Sum of Pagu 2022</b>
<b>Bel Brg</b>	<b>12.943.210.709.828</b>
BMP	265.253.468.000
Honor	54.134.120.000
Jaldis	3.693.722.000
Langg Air	11.631.982.000
Langg Listrik	109.733.560.000
Langg Telepon	13.658.540.000
Makan	39.420.000
Non Honor	6.317.963.674.308
(blank)	6.167.102.223.520

Diketahui terdapat belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) sebesar Rp265.253.468.000,00 yang merupakan belanja tanpa melalui prosedur pengadaan, karena Mabes Polri langsung berkontrak dengan Pertamina sesuai dengan harga yang berlaku umum untuk BBM non Subsidi dan satker-satker di lingkungan Polri menerima Dokumen untuk pengambilan BBM ke Pertamina dari Mabes Polri dengan anggaran disiapkan di DIPA masing-masing Satker.

Diketahui terdapat belanja Honor sebesar Rp54.134.120.000,00 untuk Pemangku Anggaran (KPA, PPK, Tim/Pokja yang ada) yang juga tanpa melalui prosedur pengadaan.

Diketahui terdapat belanja Langganan untuk Air, Listrik, dan Telepon masing-masing sebesar Rp11.631.982.000,00, Rp109.733.560.000,00 dan Rp13.658.540.000,00 yang juga tanpa melalui prosedur pengadaan.

Untuk Belanja dengan keterangan "(blank)" sebesar Rp6.167.102.223.520,00 terdiri dari 12.699 baris yang belum dapat dikategorikan sebagai jenis belanja secara manual.

#### **D. Penutup**

Data download SiRUP secara lengkap tidak mudah didapatkan dari LKPP sehingga proses analisis tidak dapat berlangsung dengan cepat dan mudah. Demikian juga dengan banyaknya Paket Pengadaan yang diinput ke dalam Aplikasi SiRUP oleh para operator Polri membuat data yang didownload sangat besar, namun tidak seluruhnya bermanfaat untuk analisis Pengadaan Barang dan Jasa Polri.

Hasil Olahan Data SiRUP untuk Triwulan I Tahun 2022 belum sempurna dan masih mengandung kesalahan data. Hal ini akan menjadi perhatian Tim Pendampingan ke depannya.

Diharapkan hal ini dapat diperbaiki pada Triwulan II Tahun 2022 dan trilwulan-triwulan berikutnya.